

Judul : Setelah diajak DPR diskusi tentang RUU Cipta Kerja, buruh tetap demo
Tanggal : Selasa, 01 September 2020
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Setelah Diajak DPR Diskusi Tentang RUU Cipta Kerja, Buruh Tetap Demo

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, DPR mendukung terciptanya lapangan kerja, perbaikan ekonomi, tumbuh dan berkembangnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja.

Karena itu, Puan menegaskan, DPR tetap akan melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka dan mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional.

DPR, lanjut Puan, juga terbuka dalam menyerap semua aspirasi tentang Omnibus Law RUU

Cipta Kerja, sejalan dengan janji akan transparan dan cermat dalam pembahasan yang sedang dilakukan DPR dengan pemerintah.

Sebab, kata Puan, DPR merupakan rumah rakyat. Sehingga, DPR membuka pintu bagi kelompok buruh atau pekerja untuk menyampaikan aspirasinya secara legal dan formal, dengan mendata berbagai persoalan terkait RUU Cipta Kerja.

Lantaran itulah, Puan meminta kelompok buruh yang memiliki aspirasi penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja, tidak hanya menyampaikannya lewat aksi nonformal sepe-

ti demonstrasi.

Menurut Puan, penyampaian aspirasi melalui demonstrasi sebaiknya dihindari. Sebab, demonstrasi berpotensi menimbulkan kemacetan, mengganggu kenyamanan masyarakat lain hingga berpotensi menjadi klaster penyebaran Covid-19.

Untuk itu, lanjutnya, DPR sudah menggelar pertemuan dengan 16 perwakilan serikat buruh/serikat pekerja di Jakarta 20-21 Agustus 2020. Puan mengklaim, pertemuan itu menghasilkan empat poin kesepakatan terkait klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.

Kesepakatan tersebut di antaranya tentang hubungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri, dan pembahasan RUU Cipta Kerja yang terbuka untuk masukan publik.

Kendati begitu, tetap saja organisasi buruh atau pekerja menggelar unjuk rasa pada Selasa (25/8) di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Para buruh menyampaikan tuntutan mereka, yakni menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan menolak pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi Covid-19. Untuk membahas hal ini, berikut wawancaranya.

SUFMI DASCO AHMAD

Wakil Ketua DPR

Biasanya DPR Di-bully, Kini Dipercaya Pekerja



Kesepakatan tersebut, sudah sampai membuat Tim Perumus yang akan merumuskan apa yang diminta serikat pekerja untuk diakomodir. Ada juga beberapa yang kita akomodir untuk dibahas di Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Buruh masih saja menggelar demonstrasi menolak pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Bukankah sudah ada kesepakatan dengan DPR?

Kesepakatan tersebut, sudah sampai membuat Tim Perumus yang akan merumuskan apa yang diminta serikat pekerja untuk diakomodir. Ada juga beberapa yang kita akomodir untuk dibahas di Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Tapi, tetap saja ada demo...

Mereka memang sudah menyatakan, tanggal 25 Agustus akan melakukan unjuk rasa untuk mendukung DPR. Sebenarnya, mereka menolak konsep yang lama. Kemudian, kita perjuangkan untuk dibahas di Tim Teknis.

Organisasi pengusaha, memprotes tata cara penyerapan aspirasi ini. Bagaimana respons Anda?

Kalau boleh, kita juga akan memanggil Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) misalnya. Kalau bisa, Apindo jangan reaktif. Sebab, kita sedang membuat undang-undang bersama.

Ini sudah bagus, ada kesepakatan dengan serikat buruh atau pekerja untuk membahas kepentingan bersama, undang-undang bersama.

Apa sikap Anda terhadap kesepakatan dengan serikat pekerja?

Kami apresiasi, bahwa DPR dipercaya. Biasanya DPR di-bully, kini dipercaya pekerja untuk memperjuangkan aspirasi mereka.

Apakah DPR juga akan duduk bersama dengan pengusaha, seperti Apindo dalam membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja?

Iya dong. Gantian. Kan kemarin sudah ngomong Apindo. Lalu, dengan

Tim Perumus, dengan Serikat pekerja. Kita pun sudah mengundang Apindo lagi. Gantian.

Apakah DPR tidak mengakomodir kepentingan pengusaha?

Kalau dibilang tidak mengakomodir, itu keterlaluan. Kita juga mengajak pengusaha duduk bersama.

Sebenarnya, kalau ikuti konsep dari pemerintah, lebih banyak menguntungkan pengusaha. Tapi, kita mau buat imbang supaya RUU Cipta Kerja untuk semua. Bukan cuma buat pekerja. Bukan cuma buat pengusaha.

Apakah Omnibus Law RUU Cipta Kerja segera diketok?

Kita targetnya hasil, bukan target waktu. Makanya, kita tek-tok. Pengusaha juga kan terbagi dua, ada Apindo, ada Kadin (Kamar Dagang dan Industri). ■ jow

ELLY ROSITA SILABAN

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia

DPR Jangan Alergi Aksi Buruh Dong



Kami akan terus menyoroti. Di RUU Cipta Kerja, kami dapati sejumlah substansi yang merugikan buruh. Sehingga, dalam pembahasan Tim dengan tripartit, kami mengusulkan perubahan-perubahan.



DPR meminta buruh tidak melakukan demonstrasi penolakan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Bagaimana itu?

DPR jangan alergi aksi buruh dong. Kita pun melakukan unjuk rasa dengan mengikuti Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.

Apakah buruh belum memiliki kanal aspirasi yang efektif untuk menyuarakan aspirasinya tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja?

Demonstrasi buruh adalah bentuk penyampaian aspirasi. Itu diatur dan dijamin dalam Undang-Undang. DPR tidak boleh alergi dengan penyampaian keluhan buruh.

Tapi kan sedang pandemi Covid-19?

Memang benar sedang pandemi Covid 19. Tapi, kita mengikuti protokol kesehatan dalam berunjuk rasa.

Mengapa demo buruh sering ke DPR?

Ya, karena ulah DPR juga, ngotot membahas RUU Omnibus Law di tengah Pandemi Covid-19. Kenapa pula DPR ngotot membahas RUU pada masa pandemi. Ini menantang kita.

Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja berpotensi menyengsarakan buruh di masa mendatang. Ingat ya, sebagian besar buruh tidak takut lagi dengan pandemi Covid-19.

Apa yang akan dilakukan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengenai pembahasan RUU Cipta Kerja?

Kami akan terus menyoroti. Di RUU Cipta Kerja, kami dapati sejumlah substansi yang merugikan buruh. Sehingga, dalam pembahasan Tim dengan tripartit, kami mengusulkan

perubahan-perubahan.

Apa yang Anda soroti dalam RUU ini?

Yang kita soroti dalam RUU Omnibus Law Klaster Cipta Tenaga Kerja adalah, mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), outsourcing, kontrak kerja, pesangon, Tenaga Kerja Asing (TKA) dan sistem pengupahan.

Selain demo, apalagi yang akan buruh lakukan?

Selain aksi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, kami akan meminta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke DPR. Kami akan mengawal pembahasan melalui RDPU itu.

Ketika palu diketok dan tidak ada perubahan substansi, kami akan melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK). ■ JON